



Klasifikasi Dan Peringkat Dari Faktor Penyebab Keterlambatan Pada Kegiatan Infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba

Arifal Hidayat^{a,*}, Yuli Afrina^b

^aProgram Studi Teknik Sipil, Universitas Pasir Pengaraian

^bMIPA Kimia SMK Negeri 5 Pekanbaru

INFO ARTIKEL

Diterima: 7 Juli 2020

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu tentang klasifikasi dan peringkat dari faktor utama penyebab keterlambatan pada kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba tahun 2018. Metode penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu yang selanjutnya dihitung menggunakan rumus indeks kepentingan dari klasifikasi faktor penyebab keterlambatan di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor utama klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan urutan ranking adalah: (1) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (2) Dokumen kegiatan kurang tertib; (3) Sistem organisasi kegiatan buruk; (4) Penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (5) Control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (6) Sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (7) Lain-lain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan).

Kata kunci: bangun purba timur jaya; infrastruktur desa; satker dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.

E – MAIL

arifal.upp@gmail.com

yuliafrina79@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the perceptions of the Rokan Hulu District Community Empowerment and Village Empowerment Office work unit on the classification and ranking of the main factors causing delays in infrastructure development activities in Bangun Purba Timur Jaya Village, Bangun Purba District in 2018. The research method is carried out by distributing questionnaires to the Dinas work unit The Community and Village Empowerment of Rokan Hulu Regency, which is then calculated using the interest index formula from the classification of factors causing delays in the village of Bangun Purba Timur Jaya, Bangun Purba District. The results of the study concluded that the main factors of classification and ranking of the factors causing the delay in infrastructure development activities in the village of Bangun Purba Timur Jaya, Bangun Purba District according to the perception of the work unit of the Office of Community Empowerment and Rokan Hulu Regency based on ranking sequence are: (1) Planning and scheduling of activities is less well; (2) Documents about activities that are lacking in order; (3) Bad organization system; (4) Preparation of limited activity resources; (5) Control and evaluation of activities that are not good; (6) The system for preparing the plan is not mature enough; (7) Others (beyond the capabilities of the activity implementing team).

Key words: ancient archeology east glorious; village infrastructure; community and village empowerment service satker.

I. PENDAHULUAN

SILPA adalah kegiatan pembangunan yang tidak terlaksanakan karena tidak tepat waktu, ditahun 2017 terjadi SILPA pada kegiatan fisik Infrastruktur sebesar 5 persen dari dana desa Rp. 30.098.863 dan ditahun 2018 SILPA terjadi sebesar 12 persen dari dana desa yaitu Rp. 84,101,700. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam Pasal 27 disebutkan dengan jelas tentang sanksi akibat SILPA, antara lain:

1. Dalam hal terdapat SILPA dana desa lebih dari 15% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA dana desa.
2. Dalam hal pada tahun anggaran masih terdapat SILPA dana desa lebih dari 15%, bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada kepala desa yang bersangkutan. Sanksi berupa pemotongan dana desa tahun anggaran berikutnya sebesar SILPA dana desa tahun berjalan. Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan bupati/walikota.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu upaya mewujudkan prioritas dimaksud adalah mengurangi kesenjangan antara desa dan kota yang dilakukan dengan mempercepat pembangunan desa-desa mandiri serta membangun keterkaitan ekonomi lokal antara desa dan kota melalui pembangunan kawasan perdesaan.

Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitri (2019), terhadap efektivitas program pada karya tunai di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam pada pembangunan infrastruktur, dalam kesimpulannya menyatakan bahwa indikator yang harus dievaluasi dalam mengatasi masalah SILPA pada pembangunan infrastruktur di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam menurut pendapat perangkat desa faktor yang harus evaluasi adalah monitoring terhadap hasil

kerja pembangunan.

Dari dampak yang timbul serta sanksi akibat SILPA yang cenderung menimbulkan kerugian dari segi waktu dan biaya, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan pada kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu.

Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang disebut dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan desa tersebut meliputi kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Desa.

Pelaksanaan kegiatan infrastruktur di desa yang menggunakan dana desa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan dalam penetapan harga satuan kegiatan/hari orang kerja (HOK) mengacu pada peraturan Bupati/Walikota Tentang Harga Satuan Biaya setempat. Dalam pelaksanaannya pembangunan desa penting untuk mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (3). Berdasarkan pasal 78, tahapan-tahapan dalam pembangunan desa terdiri dari:

1. Perencanaan pembangunan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pengawasan dan pemantauan pembangunan desa
4. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan APB Desa
5. Penyusunan rencana desa itu dilakukan melalui musrenbang desa yang mengikutsertakan masyarakat.

Kegiatan Infrastruktur Desa

Menurut Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa, menyebutkan bahwa Kepala desa mengkoordinir kegiatan pembangunan desa yang

dilaksanakan oleh perangkat desa dan/ atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa meliputi :

1. Pembangunan desa berskala lokal desa
Pelaksanaan pembangunan desa dikelola melalui swakelola desa, kerjasama antar desa dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kepala desa mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa terhitung sejak ditetapkan APBDesa.
2. Pembangunan sektoral dan daerah masuk ke desa
Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan /atau program daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah, pemerintah daerah propinsi, atau kabupaten/kota. Dalam hal ketentuan menyatakan pelaksanaan program sektor dan /atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus pelaksanaan program sektor daerah.

Kebijakan Pembangunan Desa

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Agar Tujuan pembangunan desa benar-benar dapat diwujudkan, maka arah kebijakan pembangunan desa hendaklah berorientasi kepada azas manfaat yang berhasil dan berdaya guna. Bukan hanya sekedar keinginan segelintir elit desa, namun merupakan kebutuhan bersama seluruh masyarakat desa tidak terkecuali masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Visi misi desa Bangun Purba Timur Jaya tahun 2016-2021, arah kebijakan pembangunan desa diprioritaskan pada bidang :

1. Mengembangkan potensi lokal desa dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil
2. Mengembangkan masyarakat yang berbudaya religius
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang potensial
4. Meningkatkan informasi perdesaan
5. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penyebab Keterlambatan

Aspek-aspek dalam manajemen proyek yang dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyelesaian suatu proyek konstruksi, antara lain:

1. Perencanaan dan penjadwalan pekerjaan
2. Lingkup dokumen pekerjaan (kontrak)

3. Sistem organisasi, koordinasi dan komunikasi
4. Penyiapan sumberdaya
5. Sistem inspeksi, kontrol dan evaluasi pekerjaan
6. Aspek lain-lain (aspek diluar kemampuan pemilik dan tim pelaksana pekerjaan/TPK).

Indeks Kepentingan

Teknik analisis ini berfungsi untuk menentukan peringkat (*rangking*) dari faktor-faktor yang mempengaruhi sesuatu hal yang berhubungan dengan masalah-masalah matematis yang sering terjadi di masyarakat dan kelompok. Yang akan dijadikan variabel pengamatannya yaitu tingkat pelayanan, biaya, frekwensi, dan waktu. Rumus indeks kepentingan dari Arifal Hidayat [5]”.

Untuk penilaian dari hasil indeks kepentingan dengan cara mengurutkan setiap ranking dari masing-masing masalah yang ditinjau, sehingga dapat diketahui masalah/faktor utamanya. Selanjutnya dari hasil perhitungan terhadap indeks kepentingan tadi dapat diketahui peringkatnya dari masing-masing penilaian.

II. MATERIAL DAN METODE

Metode Pengumpulan Data

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, bersumber dari 18 kuesioner dari responden yang memiliki pengetahuan yang mendalam berkaitan dengan penelitian (satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu).
2. Data sekunder, berupa profil desa, nilai pagu dana desa tahun 2017-2018 dan kegiatan infrastruktur tahun 2017-2018.

Rancangan Kuesioner

Kuesioner akan dirancang dalam dua kelompok yaitu:

1. Data responden dan data proyek, terdiri dari jabatan responden, pengalaman responden, nilai anggaran kegiatan infrastruktur dan persentase terjadinya SILPA pada tahun anggaran 2018.
2. Data persepsi responden (satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu) terhadap klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan pada kegiatan infrastruktur di Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba.

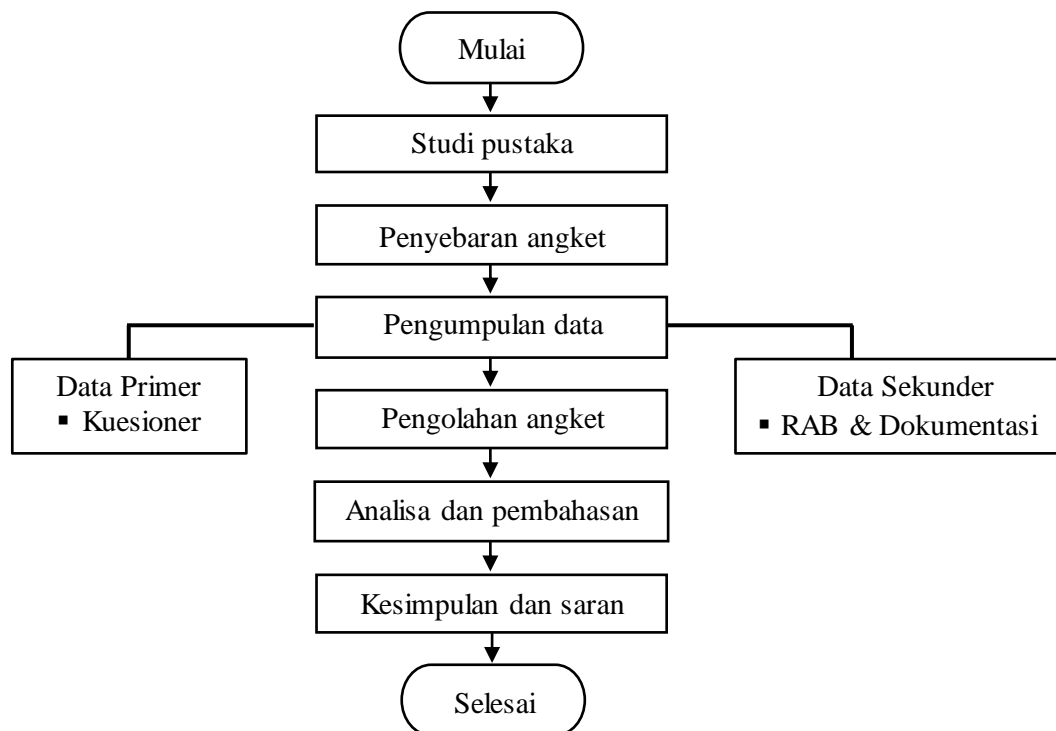
Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini memakai analisis indeks kepentingan, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Untuk analisis data

perhitungan menggunakan rumus indeks kepentingan. Uji validitas dan reliabilitas data menggunakan teknik korelasi *product moment* dengan taraf

signifikan 5% melalui beberapa tahap proses uji terhadap sampel kuesioner.

Bagan Alir Penelitian



Gambar 1. Bagan alir penelitian

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indeks Kepentingan

Hasil rangkuman kuesioner persepsi responden terhadap klasifikasi dan peringkat dari faktor

penyebab keterlambatan pada kegiatan infrastruktur desa menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil rangkuman kuesioner persepsi terhadap klasifikasi penyebab keterlambatan

Item	Klasifikasi penyebab keterlambatan	Jawaban responden				
		TB	KB	B	SB	Jml
A	Perencanaan dan penjadwalan	0	1	7	9	18
B	Dokumen kegiatan kurang tertib	0	4	7	7	18
C	Penyiapan sumber daya terbatas	0	7	8	3	18
D	Sistem organisasi	0	6	7	5	18
E	Control dan evaluasi	0	9	7	2	18
F	Sistem penyusunan rencana	0	10	8	0	18
G	Lain-lain (diluar kemampuan TPK)	4	9	5	0	18

Berdasarkan hasil rekapitan dari Tabel 1 di atas, tahapan selanjutnya dengan menggunakan rumus indeks kepentingan akan dihitung dan diketahui peringkat atau *ranking* hasil indeks kepentingan klasifikasi dan peringkat penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur desa Bangun Purba Timur Jaya dari 18 responden dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu, hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Indeks kepentingan

Klasifikasi penyebab keterlambatan	I	Ranking
Perencanaan dan penjadwalan	3,28	1
Dokumen kegiatan kurang tertib	3,16	2
Penyiapan sumber daya terbatas	2,78	4
Sistem organisasi	2,94	3
Control dan evaluasi	2,61	5
Sistem penyusunan rencana	2,44	6

Hasil analisis indeks kepentingan dari tabel di atas dapat diketahui klasifikasi dan peringkat penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur desa Bangun Purba Timur Jaya menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu adalah :

1. Perencanaan dan penjadwalan;
2. Dokumen kegiatan kurang tertib;
3. Sistem organisasi;
4. Penyiapan sumber daya terbatas;
5. Control dan evaluasi;
6. Sistem penyusunan rencana;
7. Lain-lain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan/TPK).

Analisis Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur apa yang ingin diukur dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Hasil pengujian validitas data kuesioner terhadap klasifikasi dan peringkat dari faktor penyebab keterlambatan pada kegiatan infrastruktur desa menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil korelasi (r_{hitung}) validitas

Item	Klasifikasi penyebab keterlambatan	r_{hitung}
A	Perencanaan dan penjadwalan	0,770
B	Dokumen kegiatan kurang tertib	0,728
C	Penyiapan sumber daya terbatas	0,723
D	Sistem organisasi	0,701
E	Control dan evaluasi	0,716
F	Sistem penyusunan rencana	0,635
G	Lain-lain (diluar kemampuan TPK)	0,557

Dari hasil perhitungan korelasi produk momen tabel di atas dari item A sampai G kemudian dibandingkan dengan nilai kritis produk momen tabel Uji validitas pada penelitian ini dilakukan pada 18 responden, dimana nilai r_{tabel} (korelasi *product moment*) dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,378. Hasil uji validitas instrumen didapat bahwa semua instrumen penelitian terhadap klasifikasi dan peringkat penyebab keterlambatan kegiatan infrastruktur desa Bangun Purba Timur Jaya dinyatakan valid dan layak digunakan, karena semua koefisien korelasi lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,378.

Analisis Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam gejala yang sama. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan terhadap 18 responden yang sama dari satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya dilakukan uji statistik yang sama dengan uji validitas, dari hasil uji reliabilitas instrumen diperoleh nilai *product moment* sebesar 0,804, artinya variabel instrumen penelitian memiliki nilai interpretasi cukup baik. Sehingga instrumen penelitian dapat dikatakan *reliable* dan memiliki tingkat konsistensi cukup baik.

IV. KESIMPULAN

Faktor utama klasifikasi dan peringkat dari penyebab keterlambatan kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba menurut persepsi satuan kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu menurut urutan *ranking* adalah: (1) Perencanaan dan penjadwalan kegiatan kurang baik; (2) Dokumen kegiatan kurang tertib ; (3) Sistem organisasi kegiatan buruk; (4) Penyiapan sumber daya kegiatan terbatas; (5) Control dan evaluasi kegiatan yang kurang baik; (6) Sistem penyusunan rencana yang kurang matang; (7) Lain-lain (diluar kemampuan tim pelaksana kegiatan).

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan artikel jurnal ini:

1. Rektor UPP, Ketua Prodi Teknik Sipil dan Dekan Fakultas Teknik UPP, atas arahan dan bimbingan yang diberikan selama proses penelitian;
2. Satuan kerja di lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rokan Hulu atas bantuan yang diberikan selama penelitian;
3. Semua pihak yang turut membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu namanya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- [2] Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- [3] Anonim. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
- [4] Anonim. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- [5] Anonim. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- [6] Arifal Hidayat. Analisis *Rework* Pada Proyek Konstruksi Jalan di Kabupaten Rokan Hulu. Journal APTEK, 2015.
- [7] Fitri, Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu. journal.upp.ac.id/index.php/Jurnaltaxiway/article/view/120, 2019.
- [8] <http://prosiding.upgris.ac.id/index.php/lppm2017/lppm2017/paper/viewFile/1816/1814>
- [9] <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- [10] Rajab Lubis, Efektivitas Program Padat Karya Tunai Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah. journal.upp.ac.id/index.php/Jurnal taxiway/article/view/110, 2019.
- [11] Sugiyono. Statistika untuk Penelitian, Alfa Beta. Bandung, 2012.
- [12] Widiyanti., Lenggogeni. Manajemen Konstruksi. PT. Remaja Rosdakarya. Jakarta, 2013.